



EE. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh**





**WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11. TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk :
- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
 - c. penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2026 yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. Bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. Sekretariat Daerah;
 - u. Sekretariat DPRD;
 - v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - w. Badan Keuangan Daerah;
 - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - y. Inspektorat;
 - z. Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - aa. Kecamatan Payakumbuh Timur;
 - bb. Kecamatan Payakumbuh Utara;
 - cc. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
 - aa. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
 - ee. Kantor Kesbangpol.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila dalam pelaksanaan perubahan RKPD dan hasil pengendalian, evaluasi mengalami perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 September 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR 11

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama satu tahun ke depan. Penyusunan Renja ini mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah, kebijakan startegis serta prioritas pembangunan, dengan harapan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah secara terarah, terukur dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dokumen ini. Saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi bahan berharga dalam penyempurnaan Renja ini.

Dalam hal ini kami menyadari bahwa pencapaian kinerja selama ini masih belum maksimal. Untuk itu kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik dengan senantiasa melakukan kerjasama secara terpadu untuk menghasilkan langkah-langkah dalam menunjang Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Aman, Damai dan Demokratis yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila.

Payakumbuh, 15 September 2025

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH



ADIPATI SURYA PERSADA, S.STP, MM
NIP. 19830208 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.1 Landasan Hukum.....	3
1.1 Maksud dan Tujuan	7
1.1 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra PD.....	9
2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah...	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	46
3.2. Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.....	47
3.3. Program dan kegiatan	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
BAB V PENUTUP.....	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.....	10
Tabel II-2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol.....	22
Tabel II-3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Payakumbuh	26
Tabel II-4	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.....	42
Tabel II-5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Payakumbuh.....	43
Tabel III-1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	48
Tabel III-2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Payakumbuh	49
Tabel IV-1	Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2026.....	65
Tabel IV-2	Usulan Program/Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2026	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang - Undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 yang merupakan tahun periode pertama RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045. RKPD Tahun 2026 tidak lagi berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebelumnya tapi telah mengacu kepada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang secara simultan juga sedang disusun serta mengakomodir visi dan misi dari Kepala Daerah Payakumbuh terpilih yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 merupakan tahun pertama RPJMD Kota Payakumbuh

Tahun 2025-2029. Sementara itu RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 hanya menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang nanti akan diurai capaiannya di Bab II.

Rencana Kerja atau Renja tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Namun sesuai dengan penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dokumen Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 menjadi penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dari RKPD Kota Payakumbuh dan Renstra OPD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja OPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

- Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya;
 24. Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2045;
 25. Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2);
 26. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Untuk merumuskan dan menghimpun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dalam satu tahun anggaran yang didukung struktur pembiayaan dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan kelompok sasaran yang jelas.

b. Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Sebagai landasan operasional bagi seluruh seksi-seksi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun
3. Agar seluruh program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terarah sesuai dengan rencana yang ditetapkan
4. Agar seluruh program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terlaksana secara maksimal sesuai dengan harapan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan Renja maka Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mencakup telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan program dan kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mencakup usulan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026.

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 6 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 18.999.043.693,- dengan capaian program/ kegiatan adalah Rp. 18.411.226.593,- atau sebesar 96,91 %. Dengan berakhirnya kegiatan pada tahun 2024 lalu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah menjalankan semua program yang ditargetkan dan telah berhasil dicapai sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Sedangkan untuk pencapaian Renstra pada Tahun 2025 sudah mencapai 259,31 %, hal ini karena adanya dana Hibah untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 sehingga capaian Renstra Kantor Kesbangpol sudah lebih dari 100%.

Pada Tahun 2024 tersebut kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel II.1 berikut :

TABEL II.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH**

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat	6.486.957.267	1.517.818.143	1.609.402.780	1.504.122.995	93,46%	1.871.437.875	4.893.379.013	75,43%
		Nilai IKM Kesbangpol							-	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	95.058.840	40.057.940	41.666.600	40.048.280	96,12%	33.368.350	113.474.570	119,37%
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			23.546.100	22.709.620	96,45%	8.338.000	31.047.620	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.120.500	17.338.660	95,69%	25.030.350	42.369.010	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program/kegiatan	4.868.724.524	1.091.347.661	1.167.715.416	1.077.410.944	92,27%	1.516.619.365	3.685.377.970	75,69%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			1.067.355.166	978.299.344	91,66%	1.425.902.865	2.404.202.209	
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100.360.250	99.111.600	98,76%	90.716.500	189.828.100	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	29.753.920	6.890.000	-	-		13.000.000	19.890.000	66,85%
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			-	-		13.000.000	13.000.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi umum kantor	795.918.463	208.191.973	284.323.300	276.606.213	97,29%	159.502.900	644.301.086	80,95%
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			3.345.350	3.272.000	97,81%	3.344.000	6.616.000	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor			64.787.500	63.750.000	98,40%	20.520.000	84.270.000	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			8.050.000	7.850.000	97,51%		7.850.000	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			18.344.300	17.761.000	96,82%	17.072.000	34.833.000	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			8.682.500	8.380.250	96,52%	8.746.900	17.127.150	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			7.700.400	6.312.000	81,97%	3.895.250	10.207.250	
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			9.183.250	8.105.900	88,27%	9.182.750	17.288.650	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			164.230.000	161.175.063	98,14%	96.742.000	257.917.063	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	108.000.000	33.562.000	-	-		4.799.000	38.361.000	35,52%
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan						4.799.000	4.799.000	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			-	-		-	-	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian jasa penunjang urusan kantor	338.101.520	76.940.019	60.897.464	55.560.658	91,24%	50.347.780	182.848.457	54,08%
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			21.461.208	16.249.806	75,72%	21.199.020	37.448.826	
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			5.400.000	5.360.000	99,26%	3.370.000	8.730.000	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			34.036.256	33.950.852	99,75%	25.778.760	59.729.612	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasana kantor dalam kondisi baik	251.400.000	60.828.550	54.800.000	54.496.900	99,45%	93.800.480	209.125.930	83,18%
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			24.000.000	23.939.000	99,75%	37.440.000	61.379.000	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			30.800.000	30.557.900	99,21%	41.360.000	71.917.900	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			-	-		15.000.480	15.000.480	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan	413.754.360	106.519.350	1.341.453.500	1.235.576.550	92,11%	702.129.850	2.044.225.750	494,07%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan	413.754.360	106.519.350	1.341.453.500	1.235.576.550	92,11%	702.129.850	2.044.225.750	494,07%
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			179.468.000	175.905.650	98,02%	244.146.750	420.052.400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka			1.161.985.500	1.059.670.900	91,19%	457.983.100	1.517.654.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai Politik Yang Aktif	3.473.605.639	9.396.241.063	15.235.511.263	14.901.725.533	97,81%	903.015.463	25.200.982.059	725,50%
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan parpol dan ormas yang dievaluasi dan terverifikasi sesuai aturan yang berlaku	3.473.605.639	9.396.241.063	15.235.511.263	14.901.725.533	97,81%	903.015.463	25.200.982.059	725,50%
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			15.223.825.013	14.891.302.283	97,82%	860.578.763	15.751.881.046	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			-	-		35.580.500	35.580.500	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			11.686.250	10.423.250	89,19%	6.856.200	17.279.450	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif	313.200.000	162.469.350	60.934.150	57.043.700	93,62%	100.933.850	320.446.900	102,31 %
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	313.200.000	162.469.350	60.934.150	57.043.700	93,62%	100.933.850	320.446.900	102,31 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			60.934.150	57.043.700	93,62%	100.933.850	157.977.550	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan konflik antar agama	1.022.530.960	411.313.050	118.798.850	110.150.200	92,72%	199.395.650	720.858.900	70,50%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah rekomendasi FKUB, Pakem dan tim narkoba yang dikeluarkan	1.022.530.960	411.313.050	118.798.850	110.150.200	92,72%	199.395.650	720.858.900	70,50%
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			118.798.850	110.150.200	92,72%	199.395.650	309.545.850	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi ditengah masyarakat	1.703.383.722	645.132.810	632.943.150	602.607.615	95,21%	354.878.850	1.602.619.275	94,08%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	1.703.383.722	645.132.810	632.943.150	602.607.615	95,21%	354.878.850	1.602.619.275	94,08%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			414.605.850	405.036.350	97,69%	209.193.600	614.229.950	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			81.594.300	75.193.500	92,16%	26.932.800	102.126.300	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			136.743.000	122.377.765	89,49%	118.752.450	241.130.215	
	TOTAL		13.413.431.948	12.239.493.766	18.999.043.693	18.411.226.593	96,91%	4.131.791.538	34.782.511.897	259,31%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2024 berhasil mencapai 96,91%. Secara keseluruhan tidak ada kegiatan yang realisasi di bawah 75%. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh :

1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat;
2. Koordinasi dan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Kota Payakumbuh dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sosial dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Payakumbuh;
3. Terjalannya koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial;
4. Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, TNI/Polri dan anggota masyarakat Kota Payakumbuh;
5. Telah dilaksanakan koordinasi dan sosialisasi terhadap pengurus partai politik tentang Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol;
6. Telah dilaksanakan sosialisasi pendidikan politik secara berkesinambungan bagi masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi wanita dan organisasi kepemudaan di Kota Payakumbuh;
7. Pelaksanaan monitoring kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dapat terlaksana dengan baik;
8. Adanya peran Tim Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah dan Tim Terpadu Pengawasan Ormas, sehingga terwujudnya situasi politik yang kondusif;
9. Pelaksana kegiatan bekerja sesuai dengan time schedule yang sudah ditetapkan.

Faktor penghambat kinerja yang terjadi dalam pencapaian kinerja Kantor Kesbangpol disebabkan oleh beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah intelijen pada Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi;
2. Masih adanya tingkat pemicu konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat;
3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol di daerah dalam deteksi dini permasalahan konflik sosial;
4. Masih adanya partai politik yang pengelolaan dana pendidikan politik tidak sesuai dengan peruntukannya (50% dari bantuan keuangan partai politik);
5. Seringnya terjadi pergantian pengurus baik dalam kepengurusan partai politik maupun ormas;
6. Belum optimalnya komitmen semua pejabat dan aparatur Kantor kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti : Perencanaan, Perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Untuk mengantisipasi hambatan di atas ada beberapa upaya langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas intelijen yang ada pada Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik.
2. Mendorong kolaborasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, PAKEM, FKDM, TKDD dan Informan kelurahan dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG);
3. Melakukan pembinaan terhadap forum-forum strategis Kesbangpol untuk memperkuat fungsi dan perannya;
4. Melaksanakan bimtek pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik;

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkala ke Sekretariat partai politik dan ormas;
6. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi wanita, dan organisasi kepemudaan di Kota Payakumbuh;
7. Memberikan pemahaman dan kepedulian semua pejabat dan aparatur Kantor Kesbangpol agar berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan dalam setiap pelaksanaan rapat internal kantor.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut :

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol

Kota Payakumbuh

N O	INDIKATOR	SPM /Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah penanganan konflik / jumlah konflik x 100%
2	Persentase Parpol dan Ormas yang aktif	-	√	90.64 %	90.64 %	90.64 %	90.64 %	90.72 %	91.78 %	91.95 %	92.58 %	Jumlah parpol dan ormas yang aktif / jumlah parpol dan ormas yang ada x 100%
3	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	-	-	80	80	80	80.25	71.5	78.15	80	80.25	Nilai AKIP Kantor Kesbangpol oleh Inspektorat

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kesbangpol sesuai target ditunjukkan pada indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Tengah Masyarakat dengan capaian kinerja 100% pada tahun 2023-2024, pada indikator Persentase Parpol dan Ormas yang Aktif dengan target 90,64% berhasil mencapai realisasi 90,72% tahun 2023 dan 91,78% pada tahun 2024 yang

capaiannya juga sudah mencapai 100% dan pada indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan capaian kinerja dari target 80 dari tahun 2023 sampai 2024 belum tercapai masih di bawah target akan tetapi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, memfasilitasi kehidupan demokrasi, memperkuat wawasan kebangsaan, serta meningkatkan ketahanan nasional. Dalam menghadapi dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara responsif, adaptif, dan profesional.

Secara umum permasalahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Mulai lunturnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila masyarakat dan generasi muda;
2. Masih adanya potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat diantaranya konflik SARA, konflik perbatasan, konflik lahan/tanah ulayat, konflik sumber daya alam dan orang asing;
3. Masih tingginya tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, pornografi dan judi online;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan keberadaan organisasi masyarakat yang berada di daerah;
5. Belum optimalnya pendidikan politik dan demokrasi pada masyarakat serta dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memiliki **isu-isu strategis** sebagai tantangan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta penguatan kerukunan antar umat beragama;
2. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik sara, konflik perbatasan, konflik lahan/tanah ulayat, konflik sumber daya alam dan orang asing;
3. Optimalisasi pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, pornografi serta judi online dan penyakit masyarakat lainnya;
4. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi lainnya dalam menjaga kondusivitas stabilitas daerah serta pelaksanaan pembangunan;
5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan serentak.

Tantangan Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya koordinasi dengan lintas terkait;
2. Mengembangkan sistem dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja;
3. Meningkatkan hubungan kerja internal yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.

Peluang Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
4. Membangun sistem manajemen kinerja agar optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa rancangan awal merupakan rancangan yang telah disusun dalam RKPD Awal Tahun 2026 dengan pagu Anggaran Sebesar Rp. 4.329.793.338,-. Sedangkan Renja berdasarkan Analisis Kebutuhan merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Kantor Kesbangpol, namun anggaran memakai pagu indikatif sebesar Rp. 4.045.472.162,-, seperti terdapat pada Tabel II.3 berikut :

TABEL II.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai IKM	93	1.933.322.725	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai IKM	93	1.873.693.299	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	33.368.800	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	32.764.750	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 dokumen	8.338.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 dokumen	8.337.700	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 laporan	25.030.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 laporan	23.219.550	
3						Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Payakumbuh	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1 dokumen	603.750	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Statistik Sektor Daerah		Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah			
4						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	603.750	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian adinistrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%	1.502.479.949	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian adinistrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%	1.418.313.249	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	1.411.763.449	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 orang/bulan	1.267.225.749	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	90.716.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	151.087.500	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyediaan layanan administrasi	100%	16.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyediaan layanan administrasi	100%	16.164.800	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kepegawaian perangkat daerah					kepegawaian perangkat daerah			
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Payakumbuh	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	16.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Payakumbuh	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	16.164.800	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75%	217.363.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks layanan administrasi perangkat daerah	75%	216.733.180	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Payakumbuh	jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.357.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Payakumbuh	jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.349.200	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	19.663.850	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	20.353.550	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Payakumbuh	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	17.083.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Payakumbuh	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	17.030.380	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Payakumbuh	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	8.746.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Payakumbuh	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	8.746.800	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Payakumbuh	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1056 dokumen	7.286.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Payakumbuh	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1056 dokumen	5.544.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Payakumbuh	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	8.836.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Payakumbuh	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	8.797.500	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Payakumbuh	jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	152.390.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Payakumbuh	jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	152.308.000	
15						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	603.750	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan BMD	80%	8.892.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan BMD	80%	8.406.000	
16	Pengadaan Mebel	Kota Payakumbuh	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	8.892.000	Pengadaan Mebel	Kota Payakumbuh	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	8.406.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	80%	61.502.326	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	80%	111.631.320	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Payakumbuh	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	32.353.566	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Payakumbuh	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	32.351.320	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 laporan	3.370.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 laporan	3.680.000	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Payakumbuh	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	25.778.760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Payakumbuh	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	75.600.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasana kantor dalam kondisi baik	80%	93.716.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasana kantor dalam kondisi baik	80%	69.680.000	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Payakumbuh	jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	37.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Payakumbuh	jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	24.000.000	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Payakumbuh	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 unit	41.360.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Payakumbuh	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	30.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Payakumbuh	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	14.916.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Payakumbuh	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	14.880.000	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	770.129.850	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	684.197.225	
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	120 orang	770.129.850	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	120 orang	684.197.225	
23	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	160 orang	244.146.750	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 orang	59.647.975	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Pembentukan Paskibraka	Kota Payakumbuh	Jumlah Paskibraka	54 orang	525,983,100	Pembentukan Paskibraka	Kota Payakumbuh	Jumlah Paskibraka	54 orang	624.549.250	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	930.849.370	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	881.046.463	
9	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan	3 kegiatan	930.849.370	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan	3 kegiatan	881.046.463	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	125 orang	865.877.820	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	125 orang	809.405.838	
26	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	300 orang	58.115.350	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	60 orang	64.784.775	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			
27	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 laporan	6.856.200	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 laporan	6.855.850	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	93%	100.934.150	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	93%	74.496.325	
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 rekomendasi	100.934.150	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 rekomendasi	74.496.325	
28	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 orang	100.934.150	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 orang	74.496.325	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	100%	207.598.650	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	100%	103.024.850	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan					Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan			
11	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	11 rekomendasi	207.598.650	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	11 rekomendasi	103.024.850	
29	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	207.598.650	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	103.024.850	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100%	386.958.593	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100%	429.014.000	
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	10 kasus	386.9583593	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	10 kasus	429.014.000	
30	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	200 orang	211.721.100	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	40 orang	165.952.150	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
31	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	90 orang	40.331.550	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	70 orang	37.918.900	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			serta Penanganan Konflik di Daerah					serta Penanganan Konflik di Daerah			
32	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	12 dokumen	134.905.943	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	12 dokumen	125.142.950	
	TOTAL				4.329.793.338					4.045.472.162	

Terdapat perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisa kebutuhan Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan penyesuaian anggaran pada beberapa sub kegiatan sehingga perlu penambahan ataupun pengurangan anggaran. Dalam rangka penguatan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran maka dilakukan penambahan 2 sub kegiatan kewenangan kabupaten/kota berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan data dan pelaksanaan tugas walidata pendukung. Dan untuk pelaksanaan pengelolaan arsip pada setiap SKPD juga harus menambahkan sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun pada tahun 2025 tidak terdapat usulan Musrenbang. Sedangkan dari Pemangku Kepentingan diperoleh dari usulan Pokir Anggota dan usulan Hibah dari Organisasi Kemasyarakatan dan Instansi Vertikal usulan Pemerintahan Umum. Daftar program kegiatan terhadap usulan hasil musrenbang dari masing-masing kecamatan dapat dilihat dari Tabel II.4 dan Persandingan Musrenbang Tahun 2025 untuk Program Kegiatan Tahun 2026 dan Tabel II.5 usulan dari Pemangku Kepentingan dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL II.4

Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024				Kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan/ Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2025	Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Catatan Penting

NIHIL

Tabel II.5**Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026****Kota Payakumbuh****Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Payakumbuh	Hibah untuk organisasi Pemuda Pancasila	Rp. 100.000.000,-	Pokir
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Payakumbuh	Hibah untuk Pemuda Panca Marga	Rp. 117.809.000,-	Pokir
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Payakumbuh	Sosialisasi P4GN bagi karang taruna	Rp. 80.000.000	Pokir

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Payakumbuh	Pelatihan wawasan kebangsaan Organisasi Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila	30 orang peserta, 15 orang panitia dan narasumber	Pokir
5	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Payakumbuh	Kegiatan Pendidikan Politik untuk Perempuan di Kec. Payakumbuh Tiimur dan Kec. Payakumbuh Selatan	Rp. 80.000.000,-	Pokir

Untuk usulan dari pemangku kepentingan yaitu Pokir Anggota DPRD kami sesuaikan dengan kegiatan yang telah ada di Kantor Kesbangpol seperti kegiatan sosialisasi P4GN, pelatihan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik yang telah menjadi agenda rutin tahunan di Kantor Kesbangpol dan telah kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sedangkan hibah untuk Ormas kita sesuaikan lagi dengan kemampuan daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja (Renja) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih maka Kantor Kesbangpol relevan dalam mendukung :

1. Asta Cita ke-1 :

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Azazi Manusia (HAM)

Program Prioritas ke-3 :

Reformasi Hukum, Politik dan Birokrasi

2. Asta Cita ke-2:

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Program Prioritas ke-9:

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif

3. Asta Cita ke-7 :

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Program Prioritas ke-6 :

Pencegahan dan pemberantasan narkoba

4. Asta Cita ke-8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Program Prioritas ke-16 :

Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, perawatan rumah ibadah

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Rumusan tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN /IKU	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Aman, Damai dan Demokratis yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila	1 Meningkatkan Harmonisasi di Tengah Masyarakat	1 Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	6
		2 Menurunnya Angka Konflik Sosial di Tengah Masyarakat	2 Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat	100%
		3 Meningkatkan Peran Partai Politik dan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	3 Persentase partai politik dan organisasi masyarakat yang aktif	92,58%
		4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	4 Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	80,25

3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Rumusan Program dan Kegiatan

Sebagai langkah operasional arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai terdapat dalam rencana program kegiatan kantor kesbangpol tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam Tabel III.2 berikut :

Tabel III.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Payakumbuh

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM		93	1.873.693.299			94	2.107.075.773
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		100%	32.764.750			100%	37.930.180
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kota Payakumbuh	9 dokumen	8.337.700	DAU		9 dokumen	9.171.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Payakumbuh	11 laporan	23.219.550	DAU		11 laporan	27.550.880
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Payakumbuh	1 dokumen	603.750	DAU		1 dokumen	603.750
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	10 data	603.750	DAU		10 data	603.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat		100%	1.418.313.249			100%	1.643.656.294

No	Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		waktu							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Payakumbuh	11 orang/bulan	1.267.225.749	DAU		14 orang/bulan	1.552.939.794
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Payakumbuh	12 dokumen	151.087.500	DAU		12 dokumen	90.716.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	16.164.800			100%	16.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Payakumbuh	1 paket	16.164.800	DAU		1 paket	16.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah		75%	216.733.180			75%	237.133.990
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Payakumbuh	1 paket	3.349.200	DAU		1 paket	3.692.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Payakumbuh	2 paket	20.353.550	DAU		1 paket	19.663.850
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Payakumbuh	6 paket	17.030.380	DAU		5 paket	18.791.850
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Payakumbuh	3 paket	8.746.800	DAU		3 paket	9.621.590
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	Kota Payakumbuh	1056 dokumen	5.544.000	DAU		1056 dokumen	8.015.400

No	Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		disediakan							
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Payakumbuh	12 laporan	8.797.500	DAU		12 laporan	9.719.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Payakumbuh	36 laporan	152.308.000	DAU		36 laporan	167.629.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Payakumbuh	1 dokumen	603.750	DAU		1 dokumen	603.750
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD		80%	8.406.000			80%	8.892.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Payakumbuh	6 unit	8.406.000	DAU		6 unit	8.892.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		80%	111.631.320			80%	67.652.559
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Payakumbuh	12 laporan	32.351.320	DAU		12 laporan	35.588.923
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Payakumbuh	3 laporan	3.680.000	DAU		12 laporan	3.707.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	Kota Payakumbuh	12 laporan	75.600.000	DAU		12 laporan	28.356.636
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		80%	69.680.000			80%	95.207.000

No	Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Payakumbuh	1 unit	24.000.000	DAU		1 unit	37.440.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Payakumbuh	8 unit	30.800.000	DAU		8 unit	41.360.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Payakumbuh	1 unit	14.880.000	DAU		1 unit	16.407.000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		90%	684.197.225			90%	847.142.835
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		120 orang	684.197.225			120 orang	847.142.835
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Payakumbuh	250 orang	59.647.975	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		160 orang	268.561.425
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kota Payakumbuh	54 orang	624.549.250	Opsen Pajak Kendaraan		54 orang	578.581.410

No	Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bermotor (PKB)			
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik		100%	881.046.463			100%	930.849.370
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan		3 kegiatan	881.046.463			3 kegiatan	930.849.370
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Payakumbuh	125 orang	809.405.838	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		125 orang	865.877.820

No	Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Payakumbuh	60 orang	64.784.775	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		300 orang	58.115.350
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Payakumbuh	12 laporan	6.855.850	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		12 laporan	6.856.200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif		93%	74.496.325			93%	111.027.565
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		1 rekomendasi	74.496.325			1 rekomendasi	111.027.565

No	Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Payakumbuh	120 orang	74.496.325	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		120 orang	111.027.565
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan		100%	103.024.850			100%	228.358.515
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		11 rekomendasi	103.024.850			11 rekomendasi	228.358.515
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Payakumbuh	150 orang	103.024.850	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		150 orang	228.358.515

No	Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		100%	429.014.000			100%	425.654.452
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti		10 kasus	429.014.000			10 kasus	425.654.452
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Payakumbuh	40 orang	265.952.150	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		200 orang	232.893.210
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Payakumbuh	70 orang	37.918.900	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		90 orang	44.364.705

No	Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/ kota	Kota Payakumbuh	12 dokumen	125.142.950	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		12 dokumen	148.396.537
TOTAL					4.045.472.162				4.648.297.260

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2026

- ✓ Jumlah Program sebanyak : 6 Program
- ✓ Jumlah kegiatan sebanyak : 12 Kegiatan
- ✓ Jumlah Sub. kegiatan sebanyak : 32 Sub Kegiatan
- ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaan dari APBD Kota Payakumbuh :
Rp. 4.045.472.162,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakannya. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari program dan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pembentukan Paskibraka
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- Kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik
- Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/ Pemelihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksaaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,

Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu, Renja ini secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel IV.1 dan IV.2 berikut :

Tabel IV.1

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.045.472.162,00						4.650.108.510,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						4.045.472.162,00							4.650.108.510,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.045.472.162,00							4.650.108.510,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.873.693.299,00						-	2.107.075.773,00	
		[Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai IKM	95	92.69	93	93	1.873.693.299,00	-	-	-	-	-	-	2.107.075.773,00	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	-			100 %	32.764.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol	-	37.930.180,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				9 Dokumen	8.337.700,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		9.171.800,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				11 Laporan	23.219.550,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		27.550.880,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	603.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		603.750,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				10 Data	603.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		603.750,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu</i>	-			100 %	1.418.313.249,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai Kantor Kesbangpol	-	1.643.656.294,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				11 Orang/bulan	1.267.225.749,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai Kantor Kesbangpol		1.552.939.794,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	151.087.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai Kantor Kesbangpol		90.716.500,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 %	16.164.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai Kantor Kesbangpol	-	16.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	16.164.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pegawai Kantor Kesbangpol		16.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks layanan administrasi perangkat daerah</i>	-			75 %	216.733.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol	-	237.737.740,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.349.200,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		3.692.700,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	20.353.550,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		19.663.850,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	17.030.380,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		18.791.850,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	8.746.800,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		9.621.590,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1056 Dokumen	5.544.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		8.015.400,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	8.797.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		9.719.600,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				36 Laporan	152.308.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		167.629.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	603.750,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		603.750,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan BMD</i>	-			80 %	8.406.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol	-	8.892.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				6 Unit	8.406.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		8.892.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			80 %	111.631.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol	-	67.652.559,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	32.351.320,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		35.588.923,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	3.680.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		3.707.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	75.600.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		28.356.636,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</i>	-			80 %	69.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol	-	95.207.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	24.000.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		37.440.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	30.800.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		41.360.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	14.880.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol		16.407.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						684.197.225,00						-	847.142.835,00	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	94	-	90	90	684.197.225,00	-	-	-	-	-	-	847.142.835,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</i>	-			120 orang	684.197.225,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, generasi muda dan pelajar	-	847.142.835,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				250 Orang	59.647.975,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, generasi muda dan pelajar		268.561.425,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				54 Orang	624.549.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, generasi muda dan pelajar		578.581.410,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						881.046.463,00						-	930.849.370,00	
		[Meningkatkan etika dan budaya politik]	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	100	100	881.046.463,00	-	-	-	-	-	-	930.849.370,00	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan</i>	-			3 kegiatan	881.046.463,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, tokoh agama, toko adat, generasi muda, pelajar dan pengurus parpol	-	930.849.370,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				125 Orang	809.405.838,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, tokoh agama, toko adat, generasi muda, pelajar dan pengurus parpol		865.877.820,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				60 Orang	64.784.775,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, tokoh agama, toko adat, generasi muda, pelajar dan pengurus parpol		58.115.350,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				12 Laporan	6.855.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, tokoh agama, toko adat, generasi muda, pelajar dan pengurus parpol		6.856.200,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						74.496.325,00						-	111.027.565,00	
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	94	92.19	93	93	74.496.325,00	-	-	-	-	-	-	111.027.565,00	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>	-			1 rekomendasi	74.496.325,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Organisasi Kemasyarakatan	-	111.027.565,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				120 Orang	74.496.325,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Organisasi Kemasyarakatan		111.027.565,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						103.024.850,00						-	228.358.515,00	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat]	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100	100	103.024.850,00	-	-	-	-	-	-	228.358.515,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-			11 rekomendasi	103.024.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda	-	228.358.515,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	103.024.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda		228.358.515,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						429.014.000,00						-	425.654.452,00	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100	100	100	100	429.014.000,00	-	-	-	-	-	-	425.654.452,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti</i>	-			10 kasus	429.014.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, Forkopimda dan Stakeholder terkait	-	425.654.452,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				40 Orang	265.952.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, Forkopimda dan Stakeholder terkait		232.893.210,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				70 Orang	37.918.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, Forkopimda dan Stakeholder terkait		44.364.705,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	125.142.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Tokoh masyarakat, Forkopimda dan Stakeholder terkait		148.396.537,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H								4.045.472.162,00							4.650.108.510,00	

Tabel IV.2
Usulan Program/Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional
Sumber Dana APBN
Tahun Anggaran 2026

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp)	Lokasi		Ket
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan. Dalam mewujudkan semua kegiatan yang tergambar dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini perlu memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang supaya program dan kegiatan dapat dijalankan secara efektif, efisien, kebersamaan/sinergi, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh secara umum terbantu oleh suasana dari sikap masyarakat kota payakumbuh yang masih memegang teguh adat, norma-norma agama dan sikap toleransi yang cukup tinggi terhadap berbagai macam etnis, suku yang ada di Payakumbuh. Namun semuanya itu perlu sikap waspada terhadap gangguan yang bersifat SARA. Politik sangat perlu di deteksi secara dini, hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik / kerusuhan / perkelahian banyak di dalam kehidupan masyarakat, untuk mendukung terciptanya kehidupan yang kondusif dan harmonis pada masyarakat kota sangat diperlukan staf/personil dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang mempunyai bakat, minat keterampilan pengetahuan di bidang wawasan kebangsaan, politik serta memadukannya dengan sikap dan semangat kerja keras dalam kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan dari program dan tanggung jawab yang merupakan tugas dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

Gangguan keamanan dalam bentuk apapun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dimuka bumi ini. Gangguan keamanan tersebut ada yang datang dengan didahului peringatan namun ada juga yang datang secara tiba-tiba. Manusia sebagai makhluk yang ditakdirkan hidup didunia ini diberi kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun dimana berada.

Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini merupakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dan merupakan program dasar yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Payakumbuh, dengan demikian rencana kerja ini bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya, efisien, tepat sasaran dan berdaya guna.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh secara pro aktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta keberanian untuk mengubah tatanan struktur masyarakat yang lebih demokratis dan adil merata

Demikianlah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh ini disusun, dan semoga rencana program dan kegiatan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya terima kasih.



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sri Rezeki No.5 Payakumbuh, Sumatera Barat

Telepon (0752) 95713 Fax. (0752) 95713

Email : kesbangpol.pyk@gmail.com Web. www.kesbangpolkota.go.id

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

TAHUN 2026

SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p>Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,</p>	<p>Jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2024 berjumlah: 149.077 dimana laki-laki berjumlah 75.097 (50,37%) dan perempuan berjumlah 73.980 (49,62%) . Untuk mewujudkan sistem politik yang demokrasi, perlu didukung oleh berbagai elemen, dengan menyelenggarakan pendidikan politik, terutama kepada masyarakat dapat mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan politik untuk kehidupan. Pemerintah (Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh) melaksanakan pendidikan politik bersama pimpinan partai politik, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat perempuan serta generasi muda dalam rangka menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap proses demokrasi di Kota Payakumbuh. Pelaksanaan pendidikan politik di Kota Payakumbuh dan kehadiran peserta 3 tahun terakhir</p>	<p>Akses Adanya ketimpangan perwakilan perempuan di kursi DPR</p> <p>Partisipasi Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik sangat rendah</p>	<p>1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pembinaan politik.</p> <p>2. Masih kurangnya koordinasi dengan Lintas Sektor/Intansi terkait.</p>	<p>1. Kurangnya minat masyarakat perempuan mengikut kegiatan pendidikan politik</p> <p>2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat (perempuan) tentang</p>	<p>Meningkatnya pemahaman dan peran anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat serta Generasi Muda baik yang laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan pendidikan politik untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan</p>	<p>Kegiatan 1 : Mengadakan kegiatan Pendidikan Politik dan pembinaan bagi ormas dan tokoh masyarakat serta generasi muda yang responsif gender.</p> <p>Kegiatan 2 :</p>	<p>Kehadiran peserta pendidikan politik 3 tahun terakhir (2022-2024) sebagai</p> <p>Tahun 2022 Jumlah peserta : 50 orang Jumlah laki-laki : 32 (64%) Jumlah perempuan : 18 (36%)</p> <p>Tahun 2023 Jumlah peserta : 315 Jumlah laki-laki : 191 (60,6%)</p>	<p>Kegiatan : Melaksanakan kegiatan pendidikan Politik bagi ormas dan tokoh masyarakat serta generasi muda yang responsif gender</p> <p>Input : Rp. 57.492.350,-</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tujuan : Meningkatnya pemahaman dan	Tahun 2022 Jumlah peserta : 50 orang Jumlah laki-laki : 32 (64%) Jumlah perempuan : 18 (36%) Tahun 2023 Jumlah peserta : 315 orang Jumlah laki-laki : 191 (60,6%) Jumlah perempuan : 124 (39,4%) Tahun 2024 Jumlah peserta : 350 Jumlah laki-laki : 154 (44 %) Jumlah perempuan : 196 (56 %)	Kontrol Rendahnya tingkat keberanian lingkungan sekitar (perempuan) bergabung dalam politik Manfaat Seimbangnya laki- laki dan perempuan di kursi DPRD.		pentingnya pendidikan politik 3. Peran ganda perempuan menjadi faktor kesulitan membagi waktu untuk bersosialisasi.	pemahaman terhadap proses demokrasi di daerah.	Membuat iklan/brosur/ bahan bacaan/papan reklame untuk menimbulkan minat perempuan dalam berorganisasi dan berpolitik. Kegiatan 3 : Merancang undangan pendidikan politik yang bisa dihadiri semua anggota ormas dan tokoh masyarakat perempuan. Kegiatan 4 : Meningkatkan koordinasi, advokasi, pembinaan, monitoring.	Jumlah perempuan : 124 (39,4%) Tahun 2024 Jumlah peserta : 350 Jumlah laki-laki : 154 (44 %) Jumlah perempuan : 196 (56 %)	Output : Jlh. Peserta sosialisasi 120 org Outcome : Terwujudnya etika dan budaya politik yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
peran anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat serta Generasi Muda baik yang laki-laki maupun perempuan serta generasi muda dalam berpolitik yang Demokratis sesuai aturan yang berlaku.						Kegiatan 5 : Peningkatan kualitas SDM.		

Payakumbuh, 27 Maret 2025
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh



DIPA SURYA PERSADA, SSTP, MM
NIP. 19830208 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sri Rezeki No.5 Payakumbuh, Sumatera Barat

Telepon (0752) 95713 Fax. (0752) 95713

Email : kesbangpol.pyk@gmail.com Web. www.kesbangpolkota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
KEGIATAN	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK
SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH
KODE SUB KEGIATAN	8.8.01.03.2.01.04
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Data Umum : Jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2024 berjumlah: 149.077 dimana laki-laki berjumlah 75.097 (50,37%) dan perempuan berjumlah 73.980 (49,62%) . Untuk mewujudkan sistem politik yang demokrasi, perlu didukung oleh berbagai elemen, dengan menyelenggarakan pendidikan politik, terutama kepada masyarakat dapat mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan politik untuk kehidupan. Pemerintah (Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh) melaksanakan pendidikan politik bersama pimpinan partai politik, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat perempuan serta generasi muda dalam rangka

menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap proses demokrasi di Kota Payakumbuh. Pelaksanaan pendidikan politik di Kota Payakumbuh dan kehadiran peserta 3 tahun terakhir:

Tahun 2022

Jumlah peserta : 50 orang

Jumlah laki-laki : 32 (64%)

Jumlah perempuan : 18 (36%)

Tahun 2023

Jumlah peserta : 315

Jumlah laki-laki : 191 (60,6%)

Jumlah perempuan : 124 (39,4%)

Tahun 2024

Jumlah peserta : 350

Jumlah laki-laki : 154 (44 %)

Jumlah perempuan : 196 (56 %)

2. Isu dan faktor kesenjangan gender

a. Faktor Kesenjangan yaitu :

Akses

Adanya ketimpangan perwakilan perempuan di kursi DPRD.

Partisipasi

Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik sangat rendah.

Kontrol

Rendahnya tingkat keberanian lingkungan sekitar (perempuan) bergabung dalam politik.

Manfaat

Seimbang nya laki-laki dan perempuan di kursi DPRD.

b. Penyebab Internal

- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pembinaan politik
- Masih kurangnya koordinasi dengan Lintas Sektor/Instansi terkait.

c. Penyebab Eksternal

- Kurangnya minat masyarakat perempuan mengikut kegiatan pendidikan politik
- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat (perempuan) tentang pentingnya pendidikan politik
- Peran ganda perempuan menjadi faktor kesulitan membagi

	waktu untuk bersosialisasi	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik responsif gender.
	Tujuan	Meningkatnya pemahaman dan peran anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat serta Generasi Muda baik yang laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan pendidikan politik untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap proses demokrasi di daerah..
	Aktivitas	<p>Kegiatan 1 : Mengadakan kegiatan Pendidikan Politik dan pembinaan bagi ormas dan tokoh masyarakat serta generasi muda yang responsif gender.</p> <p>Kegiatan 2 : Membuat iklan/brosur/ bahan bacaan/papan reklame untuk menimbulkan minat perempuan dalam berorganisasi dan berpolitik.</p> <p>Kegiatan 3 : Merancang undangan pendidikan politik yang bisa dihadiri semua anggota ormas dan tokoh masyarakat perempuan.</p> <p>Kegiatan 4 : Meningkatkan koordinasi, advokasi, pembinaan, monitoring.</p> <p>Kegiatan 5 : Peningkatan kualitas SDM.</p>
	Sumber daya (Input)	<p>Dana : APBD</p> <p>Panitia : Kesbangpol</p> <p>Peserta : Organisasi Masyarakat, Generasi Muda, Tokoh Masyarakat</p> <p>Narasumber tingkat kota dan Provinsi</p>

		Output	jumlah kehadiran peserta pendidikan politik
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 57.492.350,-	
	SDM	Panitia : 13 orang Laki-laki : 5 orang perempuan : 8 Peserta : 120 orang Narasumber : 3 orang	
	Peralatan dan mesin	Infocus, laptop dan printer	
OUTCOMES	Rumusan Kinerja - Terwujudnya etika dan budaya politik yang demokrasi sesuai dengan ketentuan. Indikator Kinerja - Jumlah laki-laki dan perempuan dalam mengikuti kegiatan pendidikan politik		

Payakumbuh, 27 Maret 2025

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh



DI PA SURYA PERSADA, SSTP, MM
NIP. 19830208 200112 1 002

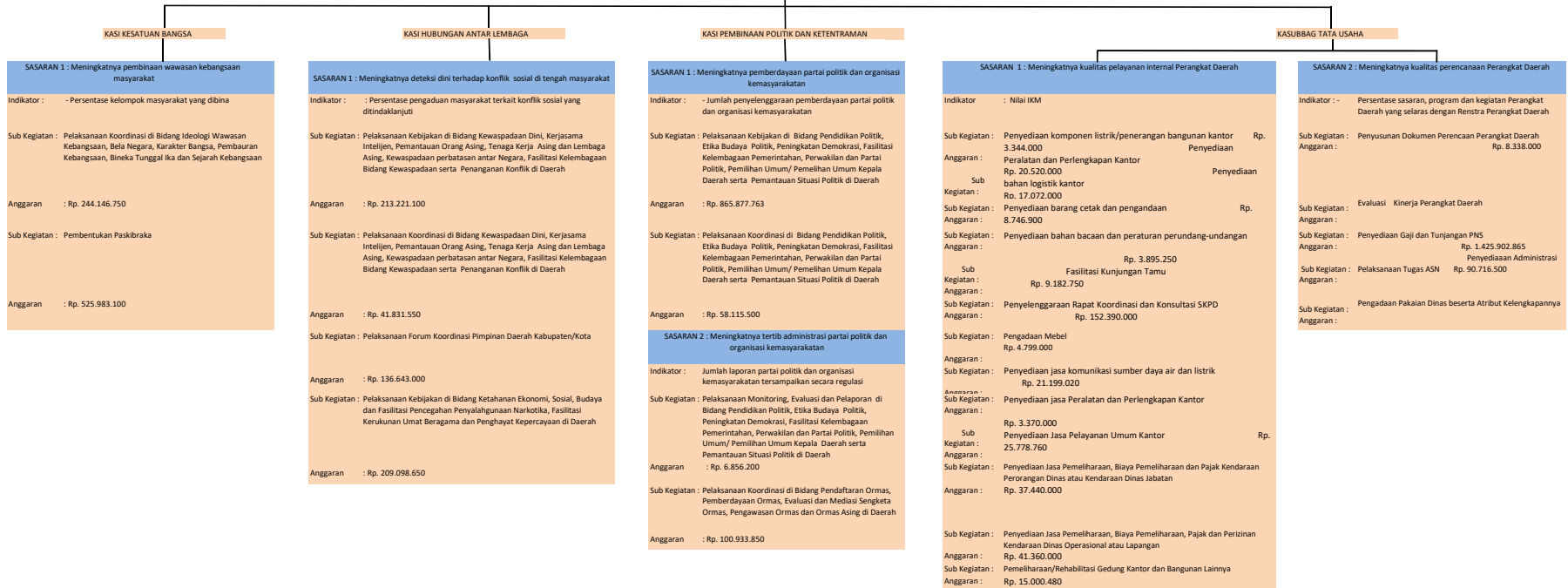
**CASCADING KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPALA KANTOR

SASARAN 1 : Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat
INDIKATOR : Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat
SASARAN 2 : Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi
INDIKATOR : Persentase parpol dan ormas yang aktif
SASARAN 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor kesbangpol
INDIKATOR: Hasil Penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat
PROGRAM : 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 3. PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 4. PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 5. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 6. PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
ANGGARAN : Rp. 4.329.793.338

ESEKON III

ESEKON IV



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1	Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat	Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat	100 %
2	Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi	Persentase Parpol dan Ormas yang Aktif	90,64 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor kesbangpol	Hasil penilaian AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat	A

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH**



DIPA SURYA PERSADA, S.STP, MM
NIP. 19830208 200112 1 002